

## Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Pesisir Kecamatan Seunuddon (Studi Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Aceh Utara)

Taufik Gunawan<sup>1</sup>, Muhaddis<sup>2</sup>, Ana Zahara<sup>3</sup>, Amru Alba<sup>4</sup>

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional

Email: [taufikgunawan67@gmail.com](mailto:taufikgunawan67@gmail.com), [almuhaddis5@gmail.com](mailto:almuhaddis5@gmail.com),  
[anazahara92@gmail.com](mailto:anazahara92@gmail.com), [albaabqa@gmail.com](mailto:albaabqa@gmail.com)

**Abstract** The Government of Aceh in 2013 issued Aceh Qanun Number 11 of 2013 concerning Social Welfare. North Aceh Regency to overcome this has carried out a variety of policies / programs with the aim of finding solutions in terms of poverty alleviation of coastal communities, but not yet optimal, the number of poverty continues to increase and and decrease from year to year, we can see that the Aceh District Government The North does not seem to be serious in suppressing and overcoming poverty, based on the writer's findings that there are still many of the coastal poverty alleviation programs that are not yet right on targeting the people who are the object of the policy / program. The purpose of this research is to analyze and describe the implementation of poverty reduction policies in coastal communities in Seunuddon District. To describe the constraints of the government in poverty alleviation of coastal communities. The study uses a qualitative approach to the type of descriptive analysis research. The results showed that the implementation of policies in poverty reduction in coastal communities in Seunuddon District the government worked with the North Aceh Regional Planning and Development Agency (BAPPEDA), North Aceh Central Statistics Agency (BPS), the Fisheries and Maritime Affairs Office, and the Social Service. The Department of Fisheries and Maritime Affairs has implemented and provided socialization to the community regarding poverty alleviation programs for the poor coastal communities, in general the poverty of coastal communities in the District of Seunuddon is influenced by cultural and structural factors. The obstacle of the government in reducing poverty of coastal communities in Seunuddon District, is related to the lack of budget, resources, facilities and infrastructure, as well as very limited information.

**Keywords:** Implementation, Policy, Mitigation, Poverty, Coastal Communities.

**Abstrak** Pemerintah Aceh pada tahun 2013 mengeluarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial. Kabupaten Aceh Utara untuk mengatasi hal tersebut telah melakukan berbagai kebijakan/ program dengan tujuan mencari solusi dalam hal penanggulangan kemiskinan masyarakat pesisir, namun belum maksimal, jumlah angka kemiskinan terus mengalami peningkatan dan dan penurunan dari tahun ke tahun, ini dapat kita lihat bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terkesan tidak serius dalam menekan dan menanggulangi angka kemiskinan, berdasarkan hasil temuan penulis bahwa masih banyak dari program penanggulangan kemiskinan masyarakat pesisir yang belum tepat mengenai sasaran kepada masyarakat yang menjadi objek dari kebijakan/ program tersebut. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan masyarakat pesisir di Kecamatan Seunuddon. Untuk mendeskripsikan kendala pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan masyarakat pesisir. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implemetasi kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan masyarakat pesisir di Kecamatan Seunuddon pemerintah bekerja sama dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Aceh Utara, Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Utara, Dinas Perikanan dan Kelautan, dan Dinas Sosial. Dinas Perikanan dan Kelautan telah melaksanakan serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang program penanggulangan kemiskinan kepada masyarakat miskin pesisir, pada umumnya kemiskinan masyarakat pesisir di Kecamatan Seunuddon di pengaruhi oleh faktor kultural dan struktural. Kendala pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan masyarakat pesisir di Kecamatan Seunuddon, terkait masih minimnya anggaran, sumber daya, sarana dan prasarana, serta informasi sangat terbatas.

**Kata Kunci:** Implementasi, Kebijakan, Penanggulangan, Kemiskinan, Masyarakat Pesisir.

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Implementasi kebijakan publik harus selalu berorientasi pada kepentingan publik. Dalam kaitan ini yang membedakan secara esensial antara implementasi kebijakan publik

dengan implementasi kebijakan non publik terletak pada muatan kepentingan publik yang harus tercermin pada setiap kebijakan publik. Pencerminkan kepentingan publik dalam kebijakan publik tidak mudah untuk diaktualisasikan oleh para pembuat kebijakan publik, karena dalam proses pembuatan, kepentingan akan selalu mempengaruhi nuansa kebijakan publik. Pada tataran inilah seringkali kepentingan publik menjadi bias terhadap kepentingan sekelompok masyarakat.

Dengan kata lain bahwa dalam setiap proses formulasi kebijakan publik akan selalu membawa implikasi yaitu ada kelompok masyarakat yang dirugikan oleh kelompok masyarakat yang diuntungkan. Pencerminkan kepentingan publik dalam kebijakan publik tidak mudah untuk diaktualisasikan oleh para pembuat kebijakan publik, karena dalam proses pembuatan, kepentingan akan selalu mempengaruhi nuansa kebijakan publik. Pada tataran ini lah seringkali kepentingan publik menjadi bias terhadap kepentingan sekelompok masyarakat. Dengan kata lain bahwa dalam setiap proses formulasi kebijakan publik akan selalu membawa implikasi yaitu ada kelompok masyarakat yang dirugikan oleh kelompok masyarakat yang diuntungkan. Untuk menghindari adanya bias kepentingan publik dalam proses formulasi kebijakan publik tersebut maka demokratisasi dalam proses pembuatan kebijakan publik menjadi penting keberadaannya, sebab melalui proses demokratisasi, dominasi kelompok dalam formulasi kebijakan dapat dihindari. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut, (Riant Nugroho, 2009 : 494).

Masalah kemiskinan masyarakat pesisir merupakan masalah yang bersifat multidimensi sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan solusi yang tepat, menyeluruh, dan bukan solusi secara parsial. Oleh karena itu, harus diketahui akar masalah yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan pada masyarakat pesisir di Aceh. Terdapat beberapa aspek yang menyebabkan terpeliharanya kemiskinan masyarakat pesisir atau masyarakat pinggiran pantai, diantaranya; Kebijakan pemerintah yang tidak memihak masyarakat miskin wilayah pesisir, banyak kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan bersifat *top down* dan selalu menjadikan masyarakat sebagai objek, bukan subjek. Kondisi bergantung pada musim sangat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir, terkadang beberapa pekan masyarakat pesisir /nelayan tidak melaut dikarenakan musim yang tidak menentu/ cuaca buruk. Dampak dari kemiskinan adalah dapat membatasi rakyat untuk memperoleh pekerjaan

dan hak rakyat untuk mengakses kebutuhan hidup, selain itu dampak kemiskinan tidak dapat memperoleh pendidikan, membiayai kesehatan, pengangguran yang semakin meningkat dan kemiskinan menyebabkan masyarakat tidak mampu memenuhi pangan, sandang dan papan, (Hall dan Midgley, 2004 : 14).

Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan peralatan yang digunakan nelayan berpengaruh pada cara dalam menangkap ikan, keterbatasan dalam pemahaman akan teknologi, menjadikan kualitas dan kuantitas tangkapan tidak mengalami perbaikan. Kondisi lain yang turut berkontribusi memperburuk tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir /nelayan adalah mengenai kebiasaan atau pola hidup dan pola pikir. Tidak pantas jika kita menyebutkan masyarakat wilayah pesisir/nelayan pemalas, karena jika dilihat dari daur hidup nelayan yang selalu bekerja keras. Namun kendalanya adalah pola hidup konsumtif, dimana pada saat penghasilan banyak, tidak ditabung untuk persiapan hidup jangka panjang, melainkan dijadikan kesempatan untuk membeli kebutuhan sekunder. (Dahuri , 2001 : 6).

Dari hasil penelitian penulis, kemiskinan masyarakat pesisir disebabkan oleh tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat, antara lain kebutuhan akan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, infrastruktur. Di samping itu, kurangnya kesempatan berusaha, kurangnya akses terhadap informasi, teknologi dan permodalan, budaya dan gaya hidup yang cenderung boros, menyebabkan posisi tawar masyarakat miskin pesisir semakin lemah. Pada saat yang sama, kebijakan Pemerintah selama ini kurang berpihak pada masyarakat pesisir sebagai salah satu pemangku kepentingan di wilayah pesisir. Dari tabel dibawah ini dapat kita lihat bahwa jumlah dan persentase penduduk miskin di Provinsi Aceh yang terus mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya.

Kemiskinan menjadi masalah sosial karena ketika kemiskinan mulai merabah atau bertambah banyak maka angka kriminalitas yang ada akan meningkat. Sekarang kemiskinan menjadi masalah sosial ketika stratifikasi dalam masyarakat sudah menciptakan tingkatan atau garis-garis pembatas, sehingga adanya kejanggalan atau batas pemisah dalam interaksi atau komunikasi antara orang yang berada ditingkatan yang dibawah dan diatasnya. Kabupaten Aceh Utara mempunyai angka kemiskinan tertinggi bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Aceh, sebesar 118.740 jiwa atau 42,5 % dan memiliki sebanyak 850 desa (Aceh Utara dalam angka, 2007-2017).

Kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara 80 % berada didaerah pedesaan. Dilematika kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara sampai saat ini masih belum tepat dicari solusi pemecahannya, baik oleh pemerintah, masyarakat ataupun lembaga non pemerintah (NGOs). Dari aspek *political will* pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan peranan partai

politik, termasuk partai politik *incumbent*, isu kemiskinan masih kurang mendapat perhatian dan rendahnya komitmen yang tercermin dalam agenda kebijakan pengentasan kemiskinan, sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBK), di mana program-program yang disusun oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan belum begitu berpihak kepada rakyat miskin, ini dapat memberi kesan bahwa kemiskinan memang seperti terabaikan. Implementasi dari hal tersebut dapat menggambarkan dari alokasi belanja aparatur sebesar 60 % dan 40 % untuk belanja publik (PDRB Kabupaten Aceh Utara, 2017).

Pengentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga diperlukan dukungan dan komitmen berbagai pihak yang terlibat dalam program pengentasan kemiskinan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Problematika kemiskinan di Kabupaten Utara sangat kompleks. Faktanya penanganan kemiskinan selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran eksekutif, legislatif, dunia usaha, Perguruan Tinggi dan masyarakat (LSM) pada umumnya belum optimal. Namun, dalam realita pengentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara dengan berbagai kebijakan yang telah dilaksanakan belum pernah menyentuh aspek-aspek yang telah ditawarkan dan tidak terintegrasi dalam sebuah kebijakan yang komprehensif. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan mulai dari tahun 2015 jumlah pesentase masyarakat miskin berada di 19,20, 2016-19,46, 2017-19,78 dan tahun 2018-18,27, ini dapat kita lihat bahwa Kabupaten Aceh Utara tidak serius dan tidak bisa menekan angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara sendiri, karena kalau kita lihat Kabupaten Aceh Utara merupakan daerah yang terbesar dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya yang ada di Provinsi Aceh, daerah yang memiliki penduduk terbanyak dan daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, ini sungguh sangat disayangkan karena masih banyak masyarakat di Kabupaten Aceh Utara hidup dalam lingkaran kemiskinan khususnya masyarakat yang berada di wilayah pesisir.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan fenomena yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan penanggulangan kemiskinan masyarakat pesisir di implementasikan di Kecamatan Seunuddon ?
2. Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan masyarakat pesisir di Kecamatan Seunuddon ?

### **METODE PENELITIAN**

## **Pendekatan**

Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Maksudnya adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan ,menjelaskan serta menganalisis serta mengembangkan terkait dengan rumusan masalah yang dibahas.

## **Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan , meneliti bahan pustaka (tulisan & hasil karya ilmiah), dan sumber-sumber bahan lainnya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

## **Teknik Analisa Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan logikan berpikir campuran,dengan tujuan untuk melakukan penggabungan pola pikir induktif untuk mencapai berbagai pandangan terkait data yang diperoleh relevansinya dengan isu permasalahan yang dibahas dalam pembahasan penelitian ini.

## **PEMBAHASAN**

### **Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Pesisir Kecamatan Seunuddon**

#### **Komunikasi**

Komunikasi merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi Program pemberdayaan masyarakat miskin wilayah pesisir dalam Program Pengembangan Perikanan Tangkap (PPPT) untuk Bidang Kelautan dan Perikanan secara aplikatif belum mencapai kepada rumah tangga sasaran. Hal tersebut dapat dilihat dari penyampaian informasi, baik melalui pertemuan formal, media cetak maupun media Televisi dan radio masih rendah, maka cukup beralasan jika dalam sosialisasi program belum mencapai kesemua rumah tangga sasaran (masyarakat miskin wilayah pesisir).

#### **Sumber daya**

Sumber daya merupakan salah satu bagian dalam proses implementasi kebijakan yang harus ditunjang oleh baik sumber daya manusia, sumber daya anggaran, materi dan metoda. Sasaran, tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan masalah yang ada dimasyarakat dan upaya memberikan pelayanan pada masyarakat. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana kebijakan, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. Sumber daya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program.

### **Disposisi**

Disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan, maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan tersebut akan menghadapi kendala yang serius sangat besar kemungkinan kebijakan tersebut tidak berjalan secara efektif sesuai dengan harapan.

### **Struktur Birokrasi**

Struktur organisasi-organisasi yang melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh penting pada proses implementasi kebijakan. Jika terdapat suatu kelemahan dalam struktur birokrasi tersebut misalnya struktur birokrasinya tidak jelas/ tidak terarah output yang dihasilkan dari struktur birokrasi tersebut tidak efektif/ efisien maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Pada dasarnya struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. Karena

struktur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi dan (*standard operating procedures/SOP*).

Kebijakan publik merupakan suatu putusan yang bisa dilakukan atau tidak, dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan publik sangat dibutuhkan strategi yang baik dari pelaku kebijakan, hal ini dilakukan bertujuan untuk terwujudnya tujuan dari kebijakan publik tersebut, ada empat komponen penting untuk mengimplementasikan kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya aparatur disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam proses mengimplementasikan dan mempercepat program penanggulangan kemiskinan masyarakat wilayah pesisir, usaha yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Aceh Utara untuk program penanggulangan kemiskinan masyarakat pesisir Kecamatan Seunuddon bisa dilakukan melalui melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Program Keluarga Harapan (PKH) pemerintah telah meluncurkan berbagai program kepada individu, keluarga, atau kelompok masyarakat kurang mampu yang bersifat saling melengkapi (komplementer) dari berbagai sektor seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk Bidang Sosial Ekonomi, Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) untuk Bidang Perumahan, Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN), Program Pengembangan Budidaya Perikanan (PPBP), Program Pembinaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (PPPHP) dan Program Pengembangan Perikanan Tangkap (PPPT) untuk Bidang Kelautan dan Perikanan, saat ini komunikasi dalam upaya implementasi.

Keputusan Bupati Aceh Utara No 560/379/2019 merupakan salah satu hal penting yang harus dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, pada hakekatnya adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan komunikator kepada komunikan. Pikiran berupa ide-ide, informasi, masalah, yang ada dalam benak perasaan membentuk keyakinan, kebaikan, sedih, senang yang muncul dan lubuk hati. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori komunikasi dan komunikasi antar lembaga terkait implementasi keputusan Bupati Aceh Utara no 560/379/ tahun 2019, fenomena yang ditemukan dilapangan, ternyata ada pihak pihak yang kurang mendukung terhadap implementasi keputusan Bupati Aceh Utara no 560/379/ tahun 2019.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme/ prosedur untuk pencairan bantuan bagi masyarakat miskin khususnya masyarakat miskin pesisir belum sesuai dengan pelayanan (kesederhanaan, transparansi, ketetapan waktu dan efisiensi) karena masih dihadapkan pada prosedur yang panjang atau birokratis sehingga diperlukan waktu yang relatif lama, disamping itu juga diperlukan kecermatan karena setiap pengurus harus mengetahui mekanisme yang ditentukan berdasarkan pemanfaatannya yaitu untuk penanggulangan

masyarakat miskin pesisir untuk biaya operasional pemantauan dan pengendalian, karena prosesnya yang begitu panjang, disisi lain banyaknya persyaratan yang harus terpenuhi, maka tidaklah heran jika para pengurus Program Pengembangan Perikanan Tangkap (PPPT) untuk Bidang Kelautan dan Perikanan, ketika mencairkan dana selalu dipandu oleh pendamping.

Hasil penelitian penulis bahwa masih adanya perbedaan persepsi dengan masyarakat miskin wilayah pesisir yang tergolong dalam Program Pengembangan Perikanan Tangkap (PPPT) untuk Bidang Kelautan dan Perikanan, terhadap mekanisme pencairan dana ataupun bantuan untuk program tersebut masih dihadapkan prosedur yang mereka pikir prosedur itu panjang dan diperlukan waktu relatif lama. Karena dilihat dari banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi di setiap anggota-anggota Program Pengembangan Perikanan Tangkap (PPPT) untuk Bidang Kelautan dan Perikanan, dalam mencairkan dana yang untuk diberikan kepada anggota-anggota kelompok tersebut di wilayah Kabupaten Aceh Utara. Program pada kelompok sasaran merupakan output dari program penanggulangan masyarakat miskin wilayah pesisir dalam Program Pengembangan Perikanan Tangkap (PPPT) untuk Bidang Kelautan dan Perikanan, yang dimana program tersebut dilaksanakan.

Berbicara tentang keefektivan pelaksanaan program, tidaklah lepas dari ketepatan waktu pencairan dana program dan sekaligus pemanfaatannya. Sebagaimana diketahui bahwa pencairan dana pada program penanggulangan bagi masyarakat miskin sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya yang seringkali secara administrasi menciptakan keterlambatan. Dengan demikian keefektivan program penanggulangan masyarakat miskin pesisir dalam Program Pengembangan Perikanan Tangkap (PPPT) untuk Bidang Kelautan dan Perikanan, kepada kelompok sasaran dapat dilihat dari pemanfaatan dana bantuan yang digulirkan melalui program penanggulangan masyarakat miskin pesisir.

Demikian halnya dalam pemanfaatannya juga sesuai dengan rencana kerja atau proposal yang diajukan oleh masing-masing kelompok sasaran. Keefektivan program terhadap penyaluran dana hal tersebut dapat dilihat dari jumlah dana yang diterima oleh masing-masing Program Pengembangan Perikanan Tangkap (PPPT) untuk Bidang Kelautan dan Perikanan. Dari hasil pantauan penulis di obyek penelitian menunjukkan bahwa penyaluran bantuan bagi masyarakat miskin wilayah pesisir yang tergolong dalam Program Pengembangan Perikanan Tangkap (PPPT) untuk Bidang Kelautan dan Perikanan, belum tepat sasaran, baik dari besarnya dana maupun yang berhak menerima. Dalam pemanfaatannya tidak ada yang menyimpang dari acuan program, bahkan semua dana yang diterima pada masing-masing anggota digunakan untuk peningkatan produktivitas walaupun sebagian dari penerima program tersebut ada yang gagal untuk meningkatkan produktifitasnya.

Dalam hal sosialisasi program yang dilakukan petugas pelaksana terhadap masyarakat miskin wilayah pesisir, meskipun hal tersebut telah dilakukan tetapi secara aplikatif belum optimal, dan hal tersebut dapat dilihat dari frekuensi pertemuan yang dilakukan pada masyarakat miskin wilayah pesisir relative kecil sehingga sebagian masih kecil masyarakat yang tidak mengetahui mengenai program-program tersebut. Melalui pertemuan formal, media Cetak televisi dan radio yang frekuensinya masih rendah. Dari hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi program penanggulangan masyarakat miskin wilayah pesisir Program Pengembangan Perikanan Tangkap (PPPT) untuk Bidang Kelautan dan Perikanan, secara aplikatif belum mencapai kepada rumah tangga sasaran. Hal tersebut dapat dilihat dari penyampaian informasi, baik melalui pertemuan formal, media cetak maupun media Televisi dan radio masih rendah, maka cukup beralasan jika dalam sosialisasi program belum mencapai kesemua rumah tangga sasaran (masyarakat miskin wilayah pesisir).

Dengan demikian sosialisasi program penanggulangan masyarakat miskin wilayah pesisir dalam Program Pengembangan Perikanan Tangkap (PPPT) untuk Bidang Kelautan dan Perikanan, masih belum efektif, karena aksesibilitas informasi yang disampaikan belum sampai kepada kelompok sasaran terkecuali bagi mereka yang tercantum dalam Program Pengembangan Perikanan Tangkap (PPPT) untuk Bidang Kelautan dan Perikanan, telah mendapatkan informasi secara lengkap, hal tersebut telah diakui oleh petugas pelaksana yang melakukan kegiatan program tersebut.

Selain itu, hasil yang didapatkan penulis dilapangan masih kurangnya sosialisasi dari pemerintah maupun dinas terkait terhadap seluruh masyarakat yang ada di wilayah pesisir dan diharapkan petugas pelaksana kegiatan pada program penanggulangan masyarakat miskin wilayah pesisir ini, lebih meningkatkan Sosialisasi Kepada Rumah Tangga Sasaran (masyarakat miskin wilayah pesisir) yang tergolong dalam Program Pengembangan Perikanan Tangkap (PPPT) untuk Bidang Kelautan dan Perikanan, mengenai program ini, dan juga dalam sosialisasi ini dapat dilakukan berbagai Media Cetak, Televisi Lokal dan di Radio disekitar Kabupaten Aceh Utara. Karena selama ini Sosialisasi yang dilakukan Petugas Pelaksana masih bersifat parsial atau belum menyeluruh. Sehingga dikalangan masyarakat miskin menimbulkan persepsi negatif. Karena sosialisasi disampaikan hanya terbatas pada warga miskin yang tergolong dalam Program Pengembangan Perikanan Tangkap (PPPT) untuk Bidang Kelautan dan Perikanan, dan belum menyeluruh pada semua masyarakat miskin wilayah pesisir yang ada di Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara.

Akibat dari kurangnya sosialisasi pemerintah dan dinas-dinas terkait mengenai penerapan Program Pengembangan Perikanan Tangkap (PPPT) untuk Bidang Kelautan dan

Perikanan, di Kabupaten Aceh Utara telah melahirkan berbagai persepsi negatif. Hasil dapat disimpulkan penulis bahwa menunjukkan betapa kecilnya bentuk sosialisasi pada Program Pengembangan Perikanan Tangkap (PPPT) untuk Bidang Kelautan dan Perikanan, yang dilaksanakan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan beserta para petugas pelaksana pendamping yang ternyata belum mencapai target sasaran kepada masyarakat miskin wilayah pesisir yang ada di Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara.

### **Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Pesisir Kecamatan Seunuddon**

Kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya faktor pendukung dan faktor penghambat yang sangat berarti, penyebab lain dari timbulnya faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena pelaksanaan program, komunikasi dan koordinasi, dan kekurangan-kekurangan yang menyangkut sulitnya memperoleh informasi yang cukup, bukti yang sulit disimpulkan, dan adanya berbagai macam kepentingan. Berikut beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan yaitu :

#### **Pelaksanaan Program**

Pelaksanaan program yang baik sangat penting karena sebagai sumber penggerak dan pelaksana kebijakan, pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan masyarakat pesisir Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara merupakan hal yang penting dalam mengimplementasikan kebijakan, meskipun komunikasi oleh pelaksanaan kebijakan berjalan dengan baik, jika terdapat kekurangan atau permasalahan terhadap sumber-sumber yang mendukung maka implementasi kebijakan cenderung tidak efektif. Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan masyarakat pesisir Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara merupakan faktor penting dalam mewujudkan tujuan dari kebijakan tersebut. Sumber-sumber yang penting tersebut bisa meliputi staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang mereka butuhkan untuk menerjemahkan kebijakan tersebut.

#### **Komunikasi dan Koordinasi Yang Sempurna**

Implementasi program penanggulangan kemiskinan masyarakat pesisir Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara dapat berjalan dengan baik jika didukung oleh komunikasi dan koordinasi yang baik, dan sarana serta prasarana lainnya yang mendukung dalam proses suatu implementasi kebijakan publik. Keberhasilan implementasi kebijakan tersebut bisa dilihat dari komunikasi dan koordinasi yang baik antara Pemerintah dan badan/instansi ataupun dinas terkait seperti Dinas Sosial dan Dinas Perikanan dan Kelautan Aceh Utara dalam

pelaksana kebijakan tersebut. Hal ini sangat penting karena implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh komunikasi dan koordinasi yang baik dengan para badan atau instansi pelaksananya.

### **Sulitnya Memperoleh Informasi Yang Cukup**

Kesulitan untuk melaksanakan program penanggulangan kemiskinan masyarakat pesisir Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara terkait erat dengan beberapa hal yang disebut, bila sulitnya memperoleh informasi yang cukup, maka implementasi program tersebut nantinya akan menemui kesulitan, implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi ataupun masih samarnya transparansi dalam proses implementasi kebijakan tersebut, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada.

### **Bukti Yang Sulit Disimpulkan**

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan program penanggulangan kemiskinan masyarakat pesisir Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara juga ditentukan aspek bukti yang sulit disimpulkan diantara para pelaku kebijakan tersebut yang terlibat dalam proses implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

Selain itu aparat pelaksana atau implementor merupakan factor lain yang menentukan apakah satu kebijakan publik sulit atau tidak diimplementasikan. Komitmen untuk berperilaku sesuai tujuan kebijakan penting dimiliki oleh aparat pelaksana, dalam hal ini diperlukan pengembangan aturan yang jelas dan sistem monitoring dan kontrol yang efektif dan transparan yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya perilaku aparat yang berlawanan dengan tujuan publik tersebut. Selain itu, masyarakat perlu diberdayakan agar lebih kritis dalam menyikapi perilaku aparat yang menyimpang. Perlu juga dipraktekkan, pilihan program sebagai upaya mengimplementasikan kebijakan *in-built* mekanisme yang menjamin transparansi dan pengawasan, hal ini penting untuk mengarahkan perilaku aparat. Selain itu, kualitas aparat dalam melaksanakan proses implementasi pun menjadi kendala yang sering dijumpai, terutama menyangkut implementasi kebijakan yang menumbuhkan keterampilan khusus.

## **Adanya Berbagai Macam Kepentingan**

Dalam proses implementasi program penanggulangan kemiskinan masyarakat pesisir Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara seringkali menimbulkan konflik dari kelompok sasaran atau masyarakat, artinya terbuka peluang munculnya kelompok tertentu diuntungkan, sedangkan dipihak lain implementasi kebijakan tersebut justru merugikan kelompok lain. Implikasinya, masalah yang muncul kemudian berasal dari orang-orang yang merasa dirugikan. Upaya untuk menghalang-halangi, tindakan complain bahkan benturan fisik biasa saja terjadi. Semakin besar konflik kepentingan yang terjadi dalam implementasi kebijakan publik, maka semakin sulit pula proses implementasi nantinya, demikian pula sebaliknya.

Pengaruh kelompok kepentingan terhadap keputusan kebijakan tergantung pada ukuran-ukuran keanggotaan kelompok, keuangan dan sumber-sumber lain, keaduannya, kecakapan dari orang yang memimpin kelompok tersebut. Selain itu pandangan orang lain terhadap kelompok tersebut akan mempengaruhi juga dalam perumusan kebijakan. Artinya jika kelompok tersebut baik di mata mereka, maka akan timbul kepercayaan orang lain terhadap kelompok tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Program Pengelolaan Perikan Tangkap dan Pesisir Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Utara jelaslah bahwa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan program tersebut sangat mempengaruhi proses implementasi sebuah kebijakan sehingga tidak semua masyarakat miskin wilayah pesisir mendapatkan bantuan dari program tersebut. Kenyataan ini kemudian memunculkan respon negatif terhadap sebagian masyarakat miskin yang ada diwilayah pesisir sehingga dalam menjalankan program tersebut menuai berbagai hambatan dan kendala.

Efektivitas program pada kelompok sasaran merupakan output dari program penanggulangan masyarakat miskin wilayah pesisir dalam Program Pengembangan Perikanan Tangkap (PPPT) untuk Bidang Kelautan dan Perikanan, yang dimana program tersebut dilaksanakan. Berbicara tentang keefektivan pelaksanaan program, tidaklah lepas dari ketepatan waktu pencairan dana program dan sekaligus pemanfaatannya. Sebagaimana diketahui bahwa pencairan dana pada program pemberdayaan bagi masyarakat miskin wilayah pesisir sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya yang seringkali secara administrasi menciptakan keterlambatan.

Dalam pelaksanaan program Program Pengembangan Perikanan Tangkap (PPPT) untuk Bidang Kelautan dan Perikanan, dalam hal ini kelompok sasaran dihadapkan pada mekanisme dan prosedur yang birokratis, maka perlunya diharapkan dilakukan pemangkasan birokrasi, dengan cara memperpendek prosedur pada mekanisme penyaluran dana dalam kegiatan

program penanggulangan masyarakat miskin wilayah pesisir, agar masyarakat tidak merasa bingung/terlalu berbelit-belit pada persoalan mekanisme prosedur pada mekanisme penyaluran dana bagi masyarakat miskin wilayah pesisir yang tergolong dalam Program Pengembangan Perikanan Tangkap (PPPT) untuk Bidang Kelautan dan Perikanan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan masyarakat pesisir Kecamatan Seunuddon Kebijakan publik merupakan suatu putusan yang bisa dilakukan atau tidak, dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan publik sangat dibutuhkan strategi yang baik dari pelaku kebijakan, hal ini dilakukan bertujuan untuk terwujudnya tujuan dari kebijakan publik tersebut, ada empat komponen penting untuk mengimplementasikan kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya aparatur disposisi, dan struktur birokrasi. *Pertama*, komunikasi, merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. *Kedua*, sumber daya, mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, sumber daya tersebut meliputi sumberdaya manusia, dan sumber daya anggaran. *Ketiga*, disposisi, merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan, maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius. *Keempat*, struktur birokrasi, struktur organisasi-organisasi yang melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh penting pada implementasi. Jika terdapat suatu kelemahan dalam struktur birokrasi tersebut, implementasi kebijakan tidak akan berhasil. Pada dasarnya struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. Karena struktur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi dan (*standard operating procedures/SOP*).
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan masyarakat pesisir Kecamatan Seunuddon Pelaksanaan implementasi program penanggulangan kemiskinan masyarakat pesisir Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh

Utara yang baik sangat penting karena sebagai sumber penggerak dan pelaksanaan sebuah kebijakan. *Pertama*, pelaksanaan program, merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan, meskipun komunikasi oleh pelaksanaan kebijakan berjalan dengan baik, jika terdapat kekurangan atau permasalahan terhadap sumber-sumber yang mendukung maka implementasi kebijakan tersebut cenderung tidak efektif, pelaksanaan program merupakan faktor penting dalam mewujudkan tujuan dari kebijakan. *Kedua*, komunikasi dan koordinasi yang sempurna, keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari komunikasi dan koordinasi yang baik pemerintah dan badan/instansi pelaksana kebijakan. Hal ini sangat penting karena implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh komunikasi dan koordinasi yang baik dengan para badan atau instansi pelaksananya. *Ketiga*, sulitnya memperoleh informasi yang cukup, kesulitan untuk melaksanakan satu program terkait erat dengan beberapa hal yang disebut, bila sulitnya memperoleh informasi yang cukup, maka implementasi program tersebut nantinya akan menemui kesulitan, implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. *Keempat*, bukti yang sulit disimpulkan, gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek bukti yang sulit disimpulkan diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Kelima, adanya berbagai macam kepentingan, proses implementasi suatu kebijakan publik seringkali menimbulkan konflik dari kelompok sasaran atau masyarakat, artinya terbuka peluang munculnya kelompok tertentu diuntungkan, sedangkan dipihak lain implementasi kebijakan tersebut justru merugikan kelompok lain. Implikasinya, masalah yang muncul kemudian berasal dari orang-orang yang merasa dirugikan. Upaya untuk menghalang-halangi, tindakan complain bahkan benturan fisik biasa saja terjadi. Semakin besar konflik kepentingan yang terjadi dalam implementasi kebijakan publik, maka semakin sulit pula proses implementasi nantinya, demikian pula sebaliknya.

### **Saran**

1. *Diharapkan bagi pemerintah agar lebih tanggap dalam memberikan bentuk perhatian yang lebih terhadap kepentingan masyarakat, seperti program-program khusus penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan, bantuan bagi masyarakat yang ada di wilayah pesisir Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara. Seharusnya pemerintah memberikan program khusus yang bisa menanggulangi kemiskinan masyarakat pesisir, karena dengan program sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah selama ini dan dengan aturan yang*

masih berdasarkan aturan pusat belum bisa mengatasi permasalahan kemiskinan masyarakat pesisir sehingga pemerintah segera mengeluarkan qanun untuk daerah agar bisa dengan cepat mengatasi masalah tersebut. Seharusnya pemerintah memberikan perhatian yang lebih dalam menanggulangi kemiskinan di wilayah pesisir *Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara* melalui program khusus supaya kemiskinan ini bisa diatasi dengan bijak sehingga tidak ada lagi masyarakat wilayah pesisir yang hidup dalam pusaran garis kemiskinan.

2. Diharapkan kepada generasi muda yang akan datang agar dapat memperdalam dan menggali penelitian tentang implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan masyarakat pesisir *Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara* supaya Aceh Utara bisa bangkit mengejar ketinggalannya dengan daerah-daerah lainnya dan keluar dari pusaran kemiskinan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abidin, Said Zainal. (2002). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pacur Siwah.
- Dunn, William N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dahuri, R et al. 2001. "Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu." Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Prianto, E. 2005. Proseding "Fenomena Aktual Tema Doktoral Arsitektur dan Perkotaan". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Lewaherilla, N.E. 2002. *Pemanfaatan Potensi Wilayah Pesisir dan Lautan*. Makalah Program Pasca Sarjana/ S3. Institut Pertanian Bogor.
- Bengen D. G. 2001. *Sinopsis Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut*. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan. Institut Pertanian Bogor.
- Usman, S. 2003. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hall, Anthony & James Midgley. 2004. "Social Policy for Development". London: Sage Publications.
- Suharti. 2000. *Potret Nelayan Kenjeran*.  
Socialforum.hyoermart.net/\_cusudi/ 00000007.html. Diakses pada tanggal 23 mei 2013.
- Abdul Wahab, Solichin. 2012. *Analisis kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Edward III, George C (edited), 1984, *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London-England.
- Purba, J. 2002. *Pengelolaan Lingkungan sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Islamy, Irfan. (2004). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Iskandar. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Gaung Persada Press.
- Lubis. Solly. (2007). *Kebijakan Publik*. Bandung: Mandar Maju.
- Narbuko, Cholid dan Ahmadi, Abu (2010). *Metodelogi Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara.

- Nugroho D, Riant. (2009). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nurcholis, Hanif (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta:Gramedia.
- Moleong, Lexy J, (2000), *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, Rosdikarya.
- Saebani, Beni Ahmad. (2008). *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia.
- Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suehartono, Irawan. (2008). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Strauss Anselm dan Corbin Juliet. (2007). *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yokyakarta : Pustaka Pelajar.
- Winarno, Budi. (2008). *Kebijakan Public: Teori dan Proses*: Jakarta, Buku Kita Yusuf bin Abdullah al-Syabali, *fiqh Jinayah*,

### **Jurnal**

- Benazir dan Azharsyah (2017) Analisis Faktor - faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Volume 11 Nomor 2*.
- Yuni Ratna Sari, Dian Kagungan (2016), Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Untuk Pengentasan Kemiskinan Berbasis Kearifan Lokal Kebijakan Kerjasama Antar Daerah dalam Rangka Optimalisasi Pengembangan Kawasan Wisata Bahari Teluk Kiluan. *Jurnal Ilmiah Econosains, Vol. 14, No. 1*.
- Yuni Ratna Sari dan dkk (2013), Model Pengentasan Kemiskinan Desa Pesisir Melalui Optimalisasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Wisata Bahari Berbasis Kearifan Lokal dan Penguatan Kelembagaan Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Sosiologi, Vol. 18, No. 2*.
- Matheus Nugroho (2015), Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kabupaten Pasuruan: Kajian Pengembangan Model Pemberdayaan Sumberdaya Manusia di Wilayah Pesisir Pantai. *Jurnal Teknologi Pangan, Volume 6 Nomor 1*.
- Manat Rahim dkk (2014), Model Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Pesisir Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. *Journal The Winners, Vol. 15, No. 1*.
- Gunawan, T., Kurniawan, R., & Muhaddis, M. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB)(Studi pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Lhokseumawe). *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik, 10(1), 155-166*.
- Zainuddin, Z., Alba, A., Gunawan, T., Armanda, D., & Zahara, A. (2022). *Implementation of gamification and bloom's digital taxonomy-based assessment: a scale development study with mixed-methods sequential exploratory design. Interactive Technology and Smart Education*.
- Abdullah, A., Bahri, S., Zainuddin, Z., & Gunawan, T. (2021). The Lived Experience of a Non-Muslim Chinese in Indonesia's Sharia-Regulated Province of Aceh: A Phenomenological Study. *Sunan Kalijaga: International Journal of Islamic Civilization, 4(1), 57-75*.
- Bahri, S., Mutaleb, A., Gunawan, T., & Zainuddin, Z. (2021). Implementasi Game Quizizz Sebagai Media Evaluasi Pembelajaran Daring Menyenangkan Di Masa Pandemi Covid-19. *Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, 13(2), 180-188*.

Muhaddis, M., Armanda, D., Junaidi, J., Rahman, B., & Gunawan, T. (2023). ANALISIS KEBIJAKAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKSUKON TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA NOMOR: 168/PDT. G/2014/MS-LSK TENTANG PENYELESAIAN HARTA BERSAMA KARNA PERCERAIAN. *ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY*, 9(1), 109-127.

Rezano, A., Ridhayanti, F., Rangkuti, A. R., Gunawan, T., Winarno, G. N. A., & Wijaya, I. (2021). Cytotoxicity of simvastatin in human breast cancer MCF-7 and MDA-MB-231 cell lines. *Asian Pacific Journal of Cancer Prevention*, 22(S1), 33-42.

### **Undang-Undang/Qanun**

Provinsi Aceh. (2006) *Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*

\_\_\_\_\_. (2013). *Qanun Aceh No. 11 tahun 2013 tentang kesejahteraan sosial*